

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kondisi akses sosial dan ekonomi mempunyai nilai yang optimal terhadap tingkat ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Hasil analisis menggunakan metode *Qualitative Comparative Analysis (QCA)* menunjukkan bahwa karakteristik ketahanan pangan yang dianalisis dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat melalui aspek rata-rata lama sekolah (RLS), indeks keterjangkauan pangan (IA), indeks pemanfaatan pangan (IP), jumlah penduduk miskin (KMS), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT), penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik ketahanan pangan di wilayah tersebut menunjukkan variasi yang kompleks dan terbagi ke dalam tiga karakteristik utama, di mana setiap karakteristik menuntut strategi intervensi yang berbeda, yaitu:

1. Karakteristik Wilayah Optimal

Karakteristik ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang ideal dan berkelanjutan. Klaster wilayah yang menunjukkan karakteristik optimal dalam penelitian ini terdapat tiga klaster, yaitu klaster Kabupaten Manokwari Selatan, klaster Kabupaten Sorong, dan klaster Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Raja Ampat. Manokwari Selatan merepresentasikan ketahanan pangan yang ditopang oleh kuatnya pemanfaatan pangan meskipun indikator lain belum optimal, Kabupaten Sorong mencerminkan ketahanan pangan yang terbentuk namun masih rentan akibat tekanan sosial ekonomi, sementara Fakfak, Kaimana, dan Raja Ampat menunjukkan ketahanan pangan yang relatif lebih seimbang karena dukungan pendidikan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang stabil, sementara Jumlah Penduduk Miskin di daerah-daerah ini tercatat rendah menunjukkan daya beli masyarakat yang stabil dan risiko kerentanan ekonomi terhadap akses pangan yang minim. Hal ini menegaskan bahwa status optimal tidak selalu mensyaratkan seluruh indikator berada pada kondisi terbaik, melainkan efektivitas kombinasi antarindikator.. Hal ini menunjukkan konfigurasi faktor di wilayah Optimal telah berhasil menjamin tercapainya ketahanan pangan yang kuat.

2. Karakteristik Wilayah Tidak Optimal

Karakteristik Tidak Optimal menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang sangat rentan dan struktural, di mana sebagian besar indikator pendukung berada pada level yang rendah. Terdapat empat klaster yang termasuk ke dalam klaster Tidak Optimal dan rentan pangan yaitu klaster Kabupaten Tambrauw dan Pegunungan Arfak, klaster Teluk Wondama, klaster Teluk Bintuni, dan Klaster Maybrat. Pada Tambrauw dan Pegunungan Arfak, ketidakefektifan ketahanan pangan terutama disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan akibat kondisi geografis yang terisolasi, sementara rendahnya kemiskinan dan pengangguran lebih mencerminkan dominasi pertanian subsisten. Di Teluk Wondama, keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya distribusi menyebabkan akses dan pemanfaatan pangan tetap lemah meskipun kondisi sosial ekonomi relatif stabil. Sementara itu, Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat menunjukkan ketahanan pangan yang belum optimal akibat lemahnya daya beli rumah tangga dan ketidakseimbangan antara akses pangan dan kondisi sosial ekonomi, sehingga kerentanan pangan di wilayah ini bersifat multidimensi.

3. Karakteristik Wilayah Kontradiktif

Karakteristik kontradiktif merupakan temuan penting yang memperlihatkan ketidakselarasan antara kondisi ketahanan pangan terhadap sosio-ekonomi. Wilayah yang menunjukkan pola kontradiktif ini adalah Kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, dan Kota Sorong. Di wilayah ini, nilai ketahanan pangan yang tinggi Indeks Ketahanan Pangan tergolong baik didukung oleh Rata-rata Lama Sekolah yang tinggi (khususnya Kota Sorong dan Manokwari) serta Indeks Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan yang tinggi, tetapi kondisi ini kontradiktif dengan kondisi sosio-ekonomi makro. Secara spesifik, wilayah ini masih mencatat Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi, karakteristik ini menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan di wilayah perkotaan ini didorong oleh statusnya sebagai pusat ekonomi, namun kondisi ini belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang ideal,

sehingga intervensi kebijakan harus difokuskan pada penguatan daya beli dan penyerapan tenaga kerja formal untuk mengatasi disparitas ekonomi yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi ketahanan pangan antarwilayah di Papua Barat. Pemetaan wilayah ke dalam klaster Optimal, Tidak Optimal, dan Kontradiktif menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak dapat disamaratakan (*one-size-fits-all*). Setiap wilayah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonominya.

Wilayah Optimal memerlukan strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai ketahanan pangan berkelanjutan. Wilayah Tidak Optimal membutuhkan intervensi lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, penguatan ekonomi rumah tangga, dan perbaikan infrastruktur kesehatan serta sanitasi. Sementara itu, wilayah Kontradiktif membutuhkan kebijakan yang lebih presisi untuk menutup kesenjangan antara indikator pangan yang kuat dan indikator sosial-ekonomi yang masih lemah, terutama terkait pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja formal.

5.2 Saran

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel tambahan atau berbeda seperti indikator lingkungan, ketersediaan pangan yang terfokus pada pangan pokok daerah yang diteliti, serta infrastruktur wilayah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan daerah.
- b. Penggunaan metode *Qualitative Comparative Analysis (QCA)* diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan teknik analisis keberlanjutan atau kombinasi metode agar dapat mengidentifikasi variabel-variabel dengan pengaruh paling optimal terhadap *outcome* ketahanan pangan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sosial dan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten seperti Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Sorong, dan Manokwari Selatan berhasil mencapai kondisi optimal melalui program peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta kebijakan keterjangkauan pangan yang berjalan efektif. Berbagai kebijakan seperti kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam menjaga keterjangkauan pangan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penyuluhan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain seperti Tambrau, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Maybrat yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, memperbaiki akses transportasi dan logistik pangan, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan masyarakat agar potensi sumber daya lokal seperti sagu, hasil laut, dan umbi-umbian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan akses sosial dan ekonomi masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian mengenai ketahanan pangan berbasis pendekatan *Qualitative Comparative Analysis (QCA)*, serta menjadi referensi praktis bagi penelitian dan kebijakan selanjutnya yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.